

Prinsip, kriteria, dan kerangka pengembangan indikator pengelolaan hutan produksi lestari



© BSN 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Pengelolaan hutan untuk produksi kayu berdasarkan status hutan	3
5 Prinsip pengelolaan hutan produksi lestari	3
6 Prinsip, kriteria, dan kerangka pengembangan indikator pada pengelolaan hutan produksi lestari.....	4
Lampiran A (normatif) Prinsip, kriteria, dan kerangka pengembangan indikator pada pengelolaan hutan produksi lestari	5
Bibliografi	14



Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) *Prinsip, kriteria, dan kerangka pengembangan indikator pengelolaan hutan produksi lestari* disusun sebagai panduan para pihak dalam pengelolaan hutan produksi lestari di Indonesia.

Standar Nasional Indonesia ini merevisi dan menggantikan SNI 19-5000-1998 *Sistem pengelolaan hutan produksi lestari*, SNI 19-5000.1-1998 *Sistem pengelolaan hutan alam produksi lestari* dan SNI 19-5005-1999 *Istilah dan definisi yang berhubungan dengan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari*. Revisi dilakukan berdasarkan perkembangan *best practice* dan ilmu pengetahuan pengelolaan hutan produksi lestari di Indonesia.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-01 Pengelolaan Hutan yang telah dibahas dalam rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 18 November 2014 di Jakarta. Hadir dalam rapat tersebut, perwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan regulator.

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 dengan hasil akhir RASNI.



Prinsip, kriteria, dan kerangka pengembangan indikator pengelolaan hutan produksi lestari

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan prinsip, kriteria, dan kerangka pengembangan indikator pengelolaan hutan produksi lestari berbasis produksi kayu pada kawasan hutan dan hutan hak.

2 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan standar ini, istilah dan definisi berikut digunakan

2.1

akses dan kontrol masyarakat

jaminan penghormatan pemanfaatan dan penguasaan terhadap sumber daya hutan yang dimiliki oleh masyarakat dan unit manajemen

2.2

hutan hak

hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah

2.3

kawasan hutan

wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

2.4

kawasan lindung

kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan

2.5

kelestarian hasil hutan

keberlanjutan dan/atau peningkatan produksi hasil hutan dari waktu ke waktu akibat peningkatan upaya pengelolaan hutan

2.6

kelestarian sumber daya hutan

keberlanjutan kemantapan dan keamanan kawasan hutan produksi serta potensi hutannya, sehingga memberikan kepastian usaha jangka panjang

2.7

kelestarian usaha

kemampuan unit manajemen dalam mengelola hutan produksi untuk memberikan keuntungan (*profit*) dan manfaat (*benefit*) dalam batas-batas kemampuan daya dukung hutan

2.8

kerangka pengembangan indikator

acuan minimum untuk perumusan parameter kualitatif maupun kuantitatif yang dapat dinilai dalam hubungannya dengan pemenuhan kondisi yang dirumuskan pada kriteria

2.9

kriteria

kondisi atau aspek-aspek dari proses dinamis ekosistem hutan atau kondisi sistem sosial terkait yang harus dikaji sebagai implikasi pengelolaan hutan

2.10

pengelola hutan hak

individu/kelompok/koperasi pengelola hutan pada lahan hak milik atau hutan adat

2.11

pengelola kawasan hutan

pemegang izin pemanfaatan dan pemegang hak pengelolaan

2.12

pemegang izin

pemegang izin pemanfaatan hutan

2.13

pemegang hak pengelolaan

badan usaha milik negara bidang kehutanan dan/atau lembaga lainnya yang mendapat hak pengelolaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.14

pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL)

serangkaian strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi produksi, ekologi, dan sosial

2.15

persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (padiatapa)

hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan menyatakan setuju atau menolak

2.16

prinsip

unsur eksplisit dari tujuan, memiliki karakter mengenai fungsi ekosistem hutan atau mengenai aspek-aspek yang relevan dari sistem sosial yang berinteraksi dengan ekosistem hutan

2.17

prinsip pemeliharaan kelestarian fungsi ekologi

keberlanjutan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dari berbagai spesies asli beserta ekosistemnya

2.18

prinsip pemeliharaan kelestarian fungsi produksi

keberlanjutan pemanfaatan hasil hutan dan usahanya

2.19**prinsip pemeliharaan kelestarian fungsi sosial**

keberlanjutan fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat setempat yang tergantung kepada hutan, baik langsung maupun tidak langsung secara lintas generasi

2.20**sintasan (*survival*) spesies endemik/langka/dilindungi**

kemampuan jenis-jenis flora-fauna endemik/langka/dilindungi untuk beradaptasi dengan habitat hutan alam produksi

2.21**stabilitas ekosistem**

ukuran keseimbangan dinamis dari struktur dan fungsi ekosistem hutan berikut komponen-komponennya sehingga menjamin kapasitas produksi optimum sesuai dengan batas-batas daya lenting ekologisnya

2.22**hak-hak tenaga kerja**

hak-hak tenaga kerja sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku

2.23**ketahanan dan pengembangan ekonomi masyarakat dan karyawan**

kegiatan ekonomi dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat tetap dapat berlangsung, termasuk termemanfaatkannya kesempatan kerja dan peluang berusaha yang terbuka, bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat secara lintas generasi

2.24**integrasi sosial dan kultural masyarakat dan pekerja**

hubungan-hubungan sosial tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya

3 Pengelolaan hutan untuk produksi kayu berdasarkan status hutan

- 3.1 Pengelolaan hutan untuk produksi kayu yaitu pengelolaan hutan alam dan/atau hutan tanaman pada kawasan hutan maupun pada hutan hak.
- 3.2 Pengelolaan hutan di kawasan hutan dilakukan oleh pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan.
- 3.3 Pengelolaan hutan hak dilakukan oleh pemilik hak.

4 Prinsip pengelolaan hutan produksi lestari

- 4.1 Pengelolaan hutan produksi lestari ditujukan untuk:
 - a) Pemeliharaan kelestarian fungsi produksi,
 - b) Pemeliharaan kelestarian fungsi ekologi,
 - c) Pemeliharaan kelestarian fungsi sosial.
- 4.2 Pengelolaan hutan produksi lestari harus memenuhi aspek legalitas dan persyaratan/kewajiban pengelola.

5 Prinsip, kriteria, dan kerangka pengembangan indikator pada pengelolaan hutan produksi lestari

- 5.1 Prinsip, kriteria dan kerangka pengembangan indikator pada pengelolaan hutan produksi lestari ini bersifat umum yang tingkat aplikasinya dapat berbeda menurut karakteristik pemegang izin, pemegang hak pengelolaan maupun pemilik hak.
- 5.2 Prinsip, kriteria, dan kerangka pengembangan indikator pada pengelolaan hutan produksi lestari sesuai Lampiran A.



Lampiran A
(normatif)

Prinsip, kriteria, dan kerangka pengembangan indikator pengelolaan hutan produksi lestari

Tabel A.1 - Prinsip, kriteria, dan kerangka pengembangan indikator pengelolaan hutan produksi lestari

No.	Prinsip, kriteria, dan kerangka pengembangan indikator	Pengelolaan pada	
		Kawasan hutan	Hutan hak
1 Pemenuhan aspek legalitas dan persyaratan/kewajiban pengelola			
1.1	Pengelola memiliki bukti entitas legal yang sesuai untuk pengelolaan hutan yang dilakukan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman sesuai dengan tujuan pengelolaan	Bukti identitas individu maupun kelompok. Bukti identitas kelompok dapat berupa kesepakatan anggota maupun bukti telah terdaftar pada instansi yang berwenang
1.2	Kawasan yang dikelola mempunyai legalitas yang menjamin pengelolaan dalam jangka panjang yang menghargai hak-hak pihak lain	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman sesuai dengan tujuan pengelolaan	Bukti hak kepemilikan lahan secara individu/kelompok maupun bukti kesepakatan kelompok atas kawasan yang dikelola
1.3	Memenuhi kewajiban pajak dan atau iuran terkait kawasan dan pengelolaan hutan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan hutan	Kewajiban pajak yang berkaitan dengan hak kepemilikan lahan
1.4	Memenuhi peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial yang disyaratkan sebelum mendapatkan ijin pengelolaan hutan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan hutan	Tidak ada izin pemanfaatan pada hutan hak
2 Pemeliharaan kelestarian fungsi produksi			
2.1 Kelestarian sumberdaya hutan			
2.1.1	Keberadaan informasi biofisik sumberdaya hutan dan kondisi sosial hasil inventarisasi hutan secara berkala	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Informasi biofisik sumberdaya hutan pada tingkat pemilik, dan jika ada pada tingkat kelompok

Tabel A.1 – (Lanjutan)

No.	Prinsip, kriteria dan kerangka pengembangan indikator	Pengelolaan pada	
		Kawasan hutan	Hutan hak
2.1.2	Penataan areal pengelolaan hutan memperhatikan kondisi biofisik sumberdaya hutan maupun kondisi sosial setempat	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman, termasuk zonasi bagian-bagian areal bernilai konservasi tinggi.	Penataan areal juga memperhatikan hak-hak pemilik lahan dan kesepakatan kelompok
2.1.3	Luas tutupan hutan dipertahankan sesuai izin pemanfaatan/ hak pengelolaan atau rencana pengelolaan pada hutan hak	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Jika ada kesepakatan kelompok, perubahan luas tutupan hutan tidak melebihi rencana yang disepakati kelompok
2.1.4	Memiliki sistem, sarana dan sumberdaya memadai untuk pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran hutan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman, namun disesuaikan dengan skala usaha
2.1.5	Memiliki sistem, sarana dan sumberdaya memadai untuk pencegahan dan penanganan gangguan hutan lainnya.	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman, namun disesuaikan dengan skala usaha
2.1.6	Memiliki informasi-informasi: potensi jenis-jenis hasil hutan bukan kayu maupun jasa lingkungan lainnya, tingkat pemanfaatannya, upaya-upaya pemeliharaan dan rehabilitasinya	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman, namun disesuaikan dengan skala usaha
2.2 Kelestarian hasil hutan			
2.2.1	Sistem silvikultur yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan tujuan pengelolaan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Sistem silvikultur memperhatikan juga karakteristik sosial setempat.
2.2.2	Perencanaan kelestarian hasil dilakukan dengan dasar data dan informasi sumberdaya hutan (biofisik) yang benar	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Ada kesepakatan kelompok tentang pengaturan kelestarian hasil

Tabel A.1 – (Lanjutan)

No.	Prinsip, kriteria dan kerangka pengembangan indikator	Pengelolaan pada	
		Kawasan hutan	Hutan hak
2.2.3	Tersedia data hasil pengamatan pertumbuhan tegakan sebagai dasar pengaturan hasil	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok
2.2.4	Produksi tahunan tidak melampaui kemampuan produktivitas hutan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman, namun disesuaikan dengan skala usaha
2.2.5	Efisiensi pemanfaatan hasil hutan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman, namun disesuaikan dengan skala usaha
2.2.6	Penatausahaan hasil hutan yang dimanfaatkan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman, namun disesuaikan dengan skala usaha
2.2.7	Penerapan pemanenan hasil hutan berdampak rendah bagi lingkungan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman, namun disesuaikan dengan skala usaha
2.3 Kelestarian usaha			
2.3.1	Kesehatan aspek finansial perusahaan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha
2.3.2	Keberadaan dan efektifitas Sistem Informasi Manajemen	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok
2.3.3	Kecukupan tenaga profesional	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok
2.3.4	Peningkatan volume tegakan (<i>standing stock</i>)	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok

Tabel A.1 – (Lanjutan)

No.	Prinsip, kriteria dan kerangka pengembangan indikator	Pengelolaan pada	
		Kawasan hutan	Hutan hak
2.3.5	Kelancaran dan keteraturan pendanaan untuk setiap aspek kegiatan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok
2.3.6	Kecukupan infrastruktur untuk pemanfaatan sumber daya hutan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok
3 Pemeliharaan kelestarian fungsi ekologi			
3.1 Stabilitas ekosistem			
3.1.1	Tersedia informasi karakteristik fisik dan biologi kawasan lindung yang ditujukan untuk konservasi tanah dan air	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok
3.1.2	Terpeliharanya kawasan lindung yang sesuai dengan tujuan konservasi tanah dan air	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok
3.1.3	Tersedia informasi intensitas penurunan kualitas dan kuantitas struktur hutan dan komposisi spesies tumbuhan yang terdampak kegiatan produksi	Berlaku pada pengelolaan hutan alam namun tidak pada tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha
3.1.4	Penanganan dampak penurunan kualitas dan kuantitas struktur dan komposisi tegakan hutan yang efektif	Berlaku pada pengelolaan hutan alam namun tidak pada tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha
3.1.5	Tersedia informasi kondisi tanah, air dan tegakan yang terdampak kegiatan produksi	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok
3.1.6	Penanganan dampak kegiatan produksi terhadap tanah dan air yang efektif	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok

Tabel A.1 – (Lanjutan)

No.	Prinsip, kriteria dan kerangka pengembangan indikator	Pengelolaan pada	
		Kawasan hutan	Hutan hak
3.1.7	Kegiatan perencanaan dan penerapan tindakan pencegahan pencemaran terhadap tanah dan air	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok
3.1.8	Penanganan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan bahan kimia lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok
3.1.9	Adanya kebijakan pengelola mengenai penggunaan maupun pengendalian jenis-jenis eksotik invasif dan/atau jenis yang termodifikasi secara genetik GMO (<i>Genetically Modified Organisms</i>)	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman, sesuai dengan kesepakatan kelompok
3.2 Sintasan spesies langka/endemik/dilindungi			
3.2.1	Adanya kebijakan pengelola dalam hal perlindungan spesies endemik/langka/ dilindungi di dalam kawasan pengelola	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok
3.2.2	Tersedianya informasi spesies endemik/langka/dilindungi di wilayah pengelolaan hutan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Jika ada maka kelengkapan informasi dapat sampai informasi jenis
3.2.3	Terkelolanya kawasan lindung yang sesuai dengan tujuan konservasi spesies endemik/langka/dilindungi	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Jika ada maka disesuaikan dengan skala usahanya
3.2.4	Kegiatan perencanaan dan penerapan tindakan pencegahan gangguan terhadap spesies endemik/langka/dilindungi	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan kesepakatan kelompok
3.2.5	Penanganan dampak kegiatan produksi terhadap spesies endemik/langka/ dilindungi yang efektif	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan kesepakatan kelompok

Tabel A.1 – (Lanjutan)

No.	Prinsip, kriteria dan kerangka pengembangan indikator	Pengelolaan pada	
		Kawasan hutan	Hutan hak
3.2.6	Tersedia sistem dan sumberdaya untuk pemantauan efektifitas penanganan dampak kegiatan produksi terhadap aspek ekologi	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan skala usaha atau kesepakatan kelompok
4 Pemeliharaan kelestarian fungsi sosial			
4.1 Akses dan kontrol masyarakat			
4.1.1	Kepastian status areal pemanfaatan hutan bagi pengelola dan masyarakat	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kesepakatan kelompok
4.1.2	Pelaksanaan padiatapa yang tepat	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kelompok atau sistem nilai setempat
4.1.3	Terdapat kebijakan pengelola dan pelaksanaannya dalam menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat maupun local	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kelompok atau sistem nilai setempat
4.1.4	Akses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kesepakatan kelompok
4.1.5	Transparansi dan akuntabilitas pengelola atas dampak kebijakan dan aktivitasnya terhadap masyarakat lokal	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kesepakatan kelompok
4.1.6	Peluang kerja dan berusaha terbuka bagi seluruh warga masyarakat	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kesepakatan kelompok

Tabel A.1 – (Lanjutan)

No.	Prinsip, kriteria dan kerangka pengembangan indikator	Pengelolaan pada	
		Kawasan hutan	Hutan hak
4.1.7	Akses komunikasi dan transportasi masyarakat terjamin	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kesepakatan kelompok
4.1.8	Terdapat mekanisme penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa yang handal	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kelompok atau sistem nilai setempat
4.2 Ketahanan dan pengembangan ekonomi wilayah			
4.2.1	Sumber-sumber ekonomi masyarakat tidak terganggu	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Tidak relevan: diasumsikan pengelolaan hutan meningkatkan sumber ekonomi masyarakat
4.2.2	Pengakuan dan kompensasi terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kelompok atau sistem nilai setempat
4.2.3	Adanya kebijakan pengelola dan implementasinya mengenai distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kelompok atau sistem nilai setempat
4.2.4	Kontribusi terhadap perkembangan perekonomian setempat	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kesepakatan kelompok
4.2.5	Adanya kebijakan dan pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kesepakatan kelompok

Tabel A.1 – (Lanjutan)

No.	Prinsip, kriteria dan kerangka pengembangan indikator	Pengelolaan pada	
		Kawasan hutan	Hutan hak
4.3. Integrasi sosial dan kultural masyarakat dan pekerja			
4.3.1	Kondisi lingkungan yang sehat dan memadai untuk menopang kehidupan anggota masyarakat	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kesepakatan kelompok
4.3.2	Adanya identifikasi potensi sosial budaya masyarakat dan karyawan untuk perencanaan kelola sosial	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Tidak relevan: diasumsikan pemilik hak adalah warga masyarakat setempat
4.3.3	Adanya perencanaan dan penerapan integrasi sosial dan kultural warga masyarakat dan karyawan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kelompok atau sistem nilai setempat
4.3.4	Adanya kebijakan pengelola dan pelaksanaan minimasi dampak terhadap kesehatan	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kelompok
4.3.5	Monitoring dampak kegiatan pengelolaan hutan terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi dan kultural masyarakat	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kelompok
4.3.6	Penggunaan infrastruktur pengelola yang bermanfaat bagi warga masyarakat tanpa mengganggu kepentingan pengelola	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kelompok
4.4 Hak-hak tenaga kerja			
4.4.1	Keberadaan dan pelaksanaan KKB (kesepakatan kerja bersama) yang disusun dengan melibatkan karyawan secara memadai	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kelompok
4.4.2	Kebebasan berserikat bagi pekerja terjamin	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Tidak relevan: diasumsikan pekerja biasanya adalah pemilik dan anggota keluarganya

Tabel A.1 – (Lanjutan)

No.	Prinsip, kriteria dan kerangka pengembangan indikator	Pengelolaan pada	
		Kawasan hutan	Hutan hak
4.4.3	Upah pekerja memenuhi standar kesejahteraan yang layak	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kelompok
4.4.4	Pelaksanaan ketentuan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja)	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Disesuaikan dengan aturan kelompok
4.4.5	Penyediaan fasilitas kesejahteraan dan kesehatan yang layak bagi pekerja dan keluarganya	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Tidak relevan: diasumsikan pekerja biasanya adalah pemilik dan anggota keluarganya
4.4.6	Adanya peningkatan kompetensi dan karir yang terencana dan terbuka bagi seluruh pekerja	Berlaku pada pengelolaan hutan alam maupun tanaman	Tidak relevan: diasumsikan pekerja biasanya adalah pemilik dan anggota keluarganya

"Hak Cipta Badan Standarisasi Nasional Cipta Standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Bibliografi

- Standar LEI 5000 Tahun 1999, *Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari*.
- Standar LEI 5000-2 Tahun 2014, *Sistem Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari*.
- Standar LEI 5000-3 Tahun 2014, *Sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari*.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2014, *Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu*.
- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014, *Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu*.

